

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

- INSTANSI** : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
- TUJUAN** : Tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan, serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik
- TUGAS** : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- FUNGSI** :
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/ TUJUAN / SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<p>Kinerja Utama Aspek Pelayanan Umum.</p> <p>Tujuan Tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan, serta pelayanan publik yang unggul berbasis elektronik.</p> <p>Sasaran Strategis :</p> <p>1. Sasaran 1 : Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat</p>	<p>1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p>	<p>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disebut dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM). Ilustrasinya sebagai berikut :</p> $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25.$ <p>Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota.</p>	Dokumen LPPD	Bagian Tata Pemerintahan

<p>2. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah</p> <p>3. Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan</p> <p>2. Sasaran 2 : Terciptanya stabilitas ekonomi daerah</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan</p> <p>2. Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan</p>		<p>Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1137 331 1765 561"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor Kinerja</th> <th>Status Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,00 - 1,80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,81 - 2,60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,61 - 3,40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,41 - 4,20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,21 - 5,00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Skor Kinerja	Status Kinerja	1	0,00 - 1,80	Sangat Rendah	2	1,81 - 2,60	Rendah	3	2,61 - 3,40	Sedang	4	3,41 - 4,20	Tinggi	5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi		
No	Skor Kinerja	Status Kinerja																				
1	0,00 - 1,80	Sangat Rendah																				
2	1,81 - 2,60	Rendah																				
3	2,61 - 3,40	Sedang																				
4	3,41 - 4,20	Tinggi																				
5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi																				
<p>3. Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja dan pelayanan public</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya pelayanan administrasi, pengelolaan asset dan rumah tangga</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan</p>	<p>2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)</p>	<p>Menghitung Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan dengan menilai beberapa variabel kunci dan besar bobot, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat koordinasi untuk harmonisasi regulasi (bobot 25%) 2. Kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan (bobot 20%) 3. Kualitas deregulasi/reregulasi peraturan perundaang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 25%) 4. Penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang peraturan (bobot 25%) <p>Setiap variabel memiliki bobot tertentu dan dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan, seperti Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022. Perhitungan akhir adalah jumlah total dari hasil perkalian bobot setiap variabel dengan skor yang diperoleh dari penilaian.</p>	<p>Dokumen Laporan IRH</p>	<p>Bagian Hukum</p>																		

<p>3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</p> <p>4. Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah</p>		<p>Hitung skor total IRH :</p> <p>Rumus untuk menghitung skor total Indeks Reformasi Hukum :</p> <p>Skor IRH = (Skor Variabel I x Bobot Variabel I) + (Skor Variabel II x Bobot Variabel II) + (Skor Variabel III x Bobot Variabel III) + (Skor Variabel IV x Bobot Variabel IV).</p> <p>Tabel kategori IRH (Ombudsman RI) :</p> <table border="1" data-bbox="1126 552 1711 997"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori Penilaian</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori Penilaian	Predikat	>90-100	AA	Istimewa	>80-90	A	Sangat Baik	>70-80	BB	Baik	>60-70	B	Cukup Baik	>50-60	CC	Cukup	>30-50	C	Buruk		
Rentang Nilai	Kategori Penilaian	Predikat																							
>90-100	AA	Istimewa																							
>80-90	A	Sangat Baik																							
>70-80	BB	Baik																							
>60-70	B	Cukup Baik																							
>50-60	CC	Cukup																							
>30-50	C	Buruk																							
	<p>3. Indeks Zakat Nasional (IZN)</p>	<p>Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur kinerja pengelolaan zakat di seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh BAZNAS. IZN digunakan untuk mengukur seberapa baik dan efektif pengelolaan zakat, efisiensi, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Alat ukur ini bersifat dinamis dan terus disesuaikan dengan perkembangan</p>	<p>Dokumen Laporan IZN</p>	<p>Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>																					

		<p>praktik pengelolaan zakat modern.</p> <p>Komponen dan cara kerja IZN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Menggunakan berbagai indikator yang mencakup perencanaan, evaluasi, program strategis (kelembagaan, SDM, infrastruktur), serta aspek aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. • Skala nilai : Nilai IZN berkisar antara 0.00 hingga 1,00 <ul style="list-style-type: none"> • Nilai mendekati 1,00 menunjukkan pengelolaan zakat yang sangat baik. • Nilai mendekati 0.00 menunjukkan pengelolaan zakat yang kurang baik. 		
	4. Return On Asset (ROA) BUMD	<p>Return on Asset (ROA) BUMD adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan aset atau modal yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan laba bersih, dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai ROA menunjukkan seberapa efisien BUMD mengubah asetnya menjadi keuntungan.</p> <p>Cara menghitung ROA BUMD :</p> <p>Rumus :</p> $ROA = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Asset}) \times 100\%$	Dokumen Laporan Evaluasi ROA BUMD	Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		<ul style="list-style-type: none"> • Laba Bersih : Keuntungan yang dihasilkan BUMD setelah dikurangi biaya operasional dan pajak pada periode tertentu. • Total Asset : Nilai keseluruhan aset yang dimiliki BUMD pada periode yang sama, biasanya diambil dari laporan neraca 		
	<p>5. Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi (SAKIP)</p> <p>Evaluasi Sistem Kinerja Pemerintah</p>	<p>Definisi : analisis sistematis yang memberikan nilai, atribut, dan apresiasi terhadap implementasi SAKIP suatu instansi untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.</p> <p>Dasar perhitungan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) didasarkan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, dimana evaluasi kinerja meliputi lima komponen utama : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.</p> <p>Setiap komponen evaluasi ini memiliki bobot penilaian yang berbeda. Evaluasi tahunan SAKIP fokus utamanya adalah menilai efektivitas dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya sesuai visi misi Kepala Daerah.</p>	Dokumen Laporan SAKIP	Bagian Organisasi

	6. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sesuai Permenpan RB No. 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga Permenpan RB No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB No. 29 tahun 2022 serta sesuai Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).	Dokumen Laporan IPP	Bagian Organisasi
--	---	---	---------------------	-------------------

	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) merupakan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Dokumen Laporan IKM	Bagian Organisasi
--	-------------------------------------	---	---------------------	-------------------

Ponorogo, 5 November 2025



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

Agus Pramono

